



Analisis Problematika Pendidikan Indonesia Di Wilayah 3T

Ayudhia Nur Luthfia¹, Nabila Putri Wahiddiyah², Desy Safitri³,
Sujarwo Sujarwo⁴

¹⁻⁴ Program Studi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Universitas Negeri Jakarta

Korespondensi penulis : ayudhiafia13@gmail.com¹, nabilap2908@gmail.com², desysafitri04@yahoo.com³,
sujarwo-fis@unj.ac.id⁴

Abstract : *The education system in Indonesia is regulated by Law of the Republic of Indonesia Number 20 of 2003. The constitution contains the meaning, purpose and matters relating to education in Indonesia. However, if we look further, the implementation of education in Indonesia is still far from what is stated in the constitution of Law No 20 of 2003. Efforts are needed to improve the quality of education of Indonesia's young generation, especially in the 3T areas, as well as providing education services, overcoming teacher limitations, and equalizing education in the 3T areas throughout Indonesia. To be able to develop education policies and solutions in Indonesia, we need to analyze the problems of education in Indonesia..*

Keyword : *Education system, Education goals, Education quality, 3T Areas*

Abstrak : Sistem pendidikan di Indonesia tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003. Di dalam konstitusi tersebut memuat makna, tujuan dan hal-hal yang berkaitan dengan pendidikan di Indonesia. Namun, apabila kita tinjau lebih lanjut implementasi pendidikan di Indonesia masih terbilang jauh dari apa yang tertuang di konstitusi UU Nomor 20 Tahun 2003. Perlu adanya upaya untuk meningkatkan mutu pendidikan generasi muda Indonesia khususnya di daerah 3T, serta untuk memberikan layanan pendidikan, mengatasi keterbatasan guru, dan pemerataan pendidikan di wilayah 3T di seluruh Indonesia. Untuk dapat membangun sebuah kebijakan maupun solusi pendidikan di Indonesia kita perlu melakukan analisis terkait problematika pendidikan yang ada di Indonesia

Kata kunci : Sistem pendidikan, Tujuan pendidikan, Kualitas, Daerah 3T

PENDAHULUAN

Pendidikan nasional bertujuan untuk membentuk kemampuan dan kualitas hidup, harkat, martabat, dan kepribadian bangsa. Pendidikan nasional merupakan suatu upaya yang sistematis guna mewujudkan kondisi belajar dan kegiatan pembelajaran agar peserta didik aktif dalam mengembangkan kekuatan spiritual agama, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlakul karimah, dan *softskill* yang diperlukan untuk diri mereka sendiri, masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia agar mencapai tujuan nasional yang nantinya diharapkan.¹

Berdasarkan hasil survei yang dihimpun lembaga Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Bulan Juni 2022, tercatat jumlah populasi penduduk Indonesia sebesar 275,36 juta penduduk, dengan persentase rincian pendidikan sebesar 6,41% yang telah mengenyam pendidikan tinggi. 20,89% berpendidikan SMA. Kemudian berpendidikan hingga

¹ Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003 Bab 1 Pasal 1

SMP sebanyak 14,54%. Sementara itu, untuk lulusan SD sebanyak 23,4% penduduk dan sebanyak 11,14% penduduk yang belum tamat SD.²

Meskipun di Indonesia itu memiliki Program Wajib Belajar 12 tahun yang telah berhasil berjalan di beberapa titik daerah Indonesia, tetapi Pendidikan di Indonesia masih menghadapi berbagai permasalahan yang belum dapat diselesaikan. Meskipun program wajib belajar sembilan tahun sudah berjalan di Indonesia, seperti tingginya Angka Putus Sekolah (APS) di rentang usia 7 tahun hingga 15 tahun. Salah satu fokus permasalahan pendidikan yang belum dapat diselesaikan yaitu ketimpangan akses pendidikan pada area 3T.

Daerah 3T ialah daerah yang memenuhi standar karakteristik area yang jauh dan terpencil yang memiliki batasan langsung dengan wilayah negara lain. Fokus pemerintah pada daerah 3T perlu diprioritaskan, terutama di bidang sosial dan akses pendidikan, karena akses pendidikan merupakan unsur terpenting dalam membangun kualitas SDM di area 3T, yang tentunya secara otomatis akan menentukan kehidupan orang-orang pada sekitar wilayah 3T itu sendiri.

Dapat disimpulkan bahwa belum seluruh penduduk Indonesia mencicipi implementasi dari pelaksanaan sistem pendidikan yang ada. Ternyata tidak sebatas itu saja, kualitas pendidikan di Indonesia terklasifikasi berada dalam kategori buruk dikarenakan hal tersebut bisa dibuktikan berdasarkan realitas yang ada di masyarakat dan diukur dari banyaknya permasalahan pendidikan yang belum bisa diselesaikan selama ini.

Ditambah dengan seiring perkembangan zaman, pendidikan perlu menyesuaikan dan melakukan perbaikan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas SDM suatu wilayah maupun negara. Sayangnya, aspek pendidikan Indonesia masih terjebak pada banyaknya problematika pendidikan yang sangat kompleks.

Beberapa problematika pendidikan yang ada pada wilayah 3T meliputi tingkat kesejahteraan dan karir guru yang bertugas di daerah terpencil sangat rendah, kurangnya pemerataan fasilitas pendidikan, pelayanan pendidikan yang masih rendah dan sulitnya akses menuju pendidikan, dan terbatasnya distribusi guru yang berkualitas pada daerah 3T.

² Viva Budi K, 2022, "Hanya 6% Warga Indonesia yang Berpendidikan Tinggi pada Juni 2022", databoks.katadata.co.id

METODE

Teknik Pengumpulan Data

- **Studi Pustaka**

J. Supranto sebagaimana dijelaskan oleh Ruslan pada karyanya “Metode Penelitian Public Relations dan Komunikasi” mengemukakan bahwasanya metode studi pustaka atau studi literatur yakni langkah yang digunakan untuk mencari suatu data yang relevan atau informasi penelitian terdahulu dengan membaca, menganalisis jurnal referensi ilmiah, buku-buku dan media publikasi yang dapat diakses baik di perpustakaan maupun di media online. Di dalam metode studi pustaka dibagi menjadi dua, yaitu : studi literatur dan internet searching.

- **Studi Literatur**

Studi Literatur itu sendiri disimpulkan sebagai teknik dalam pengumpulan data melalui cara mengkaji bahan bacaan, jurnal maupun penelitian ilmiah terdahulu. Alasan studi literatur menjadi salah satu pilihan dalam teknik/metode pengumpulan data sebab sifatnya autentik, mudah didapatkan dan keabsahan yang valid karena telah dilakukan penelitian sebelumnya.

- **Internet Searching**

Internet searching dalam teknik pengumpulan data adalah proses mencari dan mengumpulkan informasi atau data dari berbagai sumber yang tersedia secara online melalui mesin pencari, database, situs web, dan platform online lainnya. Teknik internet searching memainkan peran penting dalam pengumpulan data di era digital, memungkinkan akses cepat dan luas terhadap informasi dari seluruh dunia. Selain itu dengan teknik pengumpulan data internet searching, penulis dapat mengakses lebih banyak sumber-sumber dalam journal, website online yang sekiranya relevan dengan topik pembahasan.

Teknik Penyajian Data

Analisis Kualitatif Deskriptif

Analisis data deskriptif kualitatif adalah metode dalam penelitian gabungan yang memadukan jenis penelitian kualitatif yang kemudian diuraikan secara deskriptif atau paragraf. Metode kualitatif merupakan metode pengolahan data berupa kata-kata, kalimat maupun huruf. Sedangkan metode deskriptif merupakan cara penyajian data dari hasil yang telah dikumpulkan dan diolah yang berupa menjabarkan, merangkai data ke dalam sebuah kalimat atau paragraf.

Metode analisis deskriptif digunakan untuk menerangkan atau menjabarkan suatu kondisi permasalahan secara rinci dan mendetail. kemudian dijabarkan melalui rangkaian kalimat dan juga paragraf memudahkan dalam memaparkan informasi lebih mendalam. Salah

satu alasan mengapa metode kualitatif deskriptif dipilih untuk artikel penulisan ini adalah karena metode ini lebih sesuai dengan studi kepustakaan sebagai teknik pengumpulan data.

KAJIAN DAN PEMBAHASAN

PROBLEMATIKA PENDIDIKAN

1. Rendahnya Tingkat Kesejahteraan Guru di Daerah 3T

Kesejahteraan guru adalah kesejahteraan meliputi material dan non material yang diberikan selama bertugas menjadi guru. Kesejahteraan merupakan hal yang utama bagi seorang guru, oleh sebabnya apabila kesejahteraan guru tercukupi, maka guru dapat meningkatkan mutu pembelajaran, selain itu, untuk meningkatkan kemampuan keprofesionalannya, kesejahteraan non material guru harus terpenuhi, agar guru lebih termotivasi dalam meningkatkan kualitas profesionalitasnya.

Guru di Indonesia saat ini dinilai cukup jauh dari kondisi sejahtera. Hasil penelitian menunjukkan bahwa persen kesejahteraan guru terdiri dari 4% tidak sejahtera, 48% kurang sejahtera, 40% sejahtera, dan 8% sangat sejahtera.³

Apabila kita lihat lebih jauh, pemerintah Indonesia seringkali masih mengabaikan kesejahteraan guru terutama pada daerah tertinggal. Sehingga berdampak kepada sedikitnya jumlah masyarakat yang tertarik untuk menjadi guru akibat rendahnya penghasilan dan tingkat kesejahteraan guru. Memperbaiki kesejahteraan guru sebenarnya juga sekaligus mampu menghilangkan stigma masyarakat yang menilai guru itu rendah, hal ini juga disebabkan persepsi publik yang sering membandingkan gaji guru dan dokter. Tingkat kesejahteraan guru hendaknya diutamakan guna mendongkrak kinerja guru yang maksimal. (Zulkifli, Darmawan, & Sutrisno, 2014),

Kesejahteraan guru termasuk upah, yakni gaji dan upah pokok maupun tunjangan tambahan. Namun, rendahnya tingkat kesejahteraan guru ini dapat kita saksikan fakta dilapangan di beberapa wilayah guru hanya mendapatkan upah dari pihak sekolah sebesar Rp. 50.000,-sampai Rp. 300.000,-. terutama kepada guru yang mengembangkan tugas di daerah 3T terutama guru-guru honorer. Problematika seringkali dikeluhkan sebagian besar guru honorer di Indonesia tak hanya menyangkut rendahnya upah yang mereka terima. Mereka kerap mengeluhkan keterlambatan penerimaan upah yang sampai berbulan-bulan, bahkan guru

³ Raudhah, 2020, "Hubungan Tingkat Kesejahteraan Guru Dengan Semangat Kerja Guru", Jurnal Guru Dikmen Dan Dikus , Volume 3 Number 2, Hlm 186

honorar mengaku takut dan gelisah apabila suatu saat diberhentikan kontraknya. (Nugraheny, 2021).

Minimnya kesejahteraan guru memiliki kaitan erat dengan mutu pendidikan di Indonesia. Pada konteks kesejahteraan guru, kompensasi yang diterimanya tidak sebanding dari sumbangsih yang mereka kerjakan dalam rangka meningkatkan kecerdasan bangsa.

Rendahnya taraf kesejahteraan ini berdampak terhadap lemahnya semangat dan motivasi guru dalam menjalankan tugas mengajarnya, hal tersebut secara tak langsung berimbas pada menurunnya mutu pendidikan di Indonesia. Kesejahteraan guru menjadi dasar utama dalam penyelenggaraan layanan pendidikan, sebab jika kesejahteraan guru baik, dengan sistem insentif yang adil dan merata, guru dapat memberikan komitmen dalam melaksanakan pelayanan yang berkualitas dan optimal kepada masyarakat.

2. Kurangnya Pemerataan Pembangunan dan Fasilitas Pendidikan

Menurut Coleman (1968), konsep pemerataan atau keadilan dimaknai kedalam beberapa perihal, pertama, pemerataan pendidikan yaitu menyediakan layanan pendidikan gratis hingga akhir pendidikan adalah sebuah akses utama bagi para angkatan kerja, mengimplementasikan kurikulum pendidikan yang setara untuk semua anak tanpa adanya perbedaan khusus atau pengecualian tanpa memandang latar belakang mereka, menyediakan pembangunan sarana fasilitas pendidikan untuk semua anak-anak yang dapat diterapkan ke seluruh siswa tanpa terkecuali. Konsep-konsep tersebut tentunya membentuk landasan sebuah langkah pemerintah untuk meningkatkan kesetaraan pendidikan. (Wibowo, 2018)⁴

Berdasarkan hasil pendataan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Ditemukan fakta sebanyak 75% jumlah sekolah di Indonesia dinyatakan belum mencapai standar kualitas pendidikan, dimana terdapat hampir 40.000 sekolah di Indonesia (Baswedan; 2014)⁵

Fasilitas pendidikan di wilayah 3T seringkali minim atau bahkan tidak ada. Sekolah-sekolah di daerah ini mungkin tidak memiliki bangunan yang layak, perpustakaan, laboratorium, atau fasilitas olahraga yang memadai. Kurangnya sarana dan prasarana dapat menghambat pengalaman belajar siswa.

Menurut Hasanah & Jabar (2017, p. 238), hambatan dalam program wajib belajar yaitu partisipasi masyarakat dan anak rendah, tidak adanya kesadaran masyarakat terhadap fungsi

⁴ Zulkarnaen, Ari Dwi Handoyo, 2019, "Faktor-Faktor Penyebab Pendidikan Tidak Merata Di Indonesia", Prosiding Seminar Nasional "Menjadi Mahasiswa Yang Unggul Di Era Industri 4.0 Dan Society 5.0", hlm 23

⁵ Mohamad A, Andika A, Melly W N, Nurlaila S, Rohman F, Potret Pendidikan di Daerah Terpencil Kampung Manceri Cigudeg Kabupaten Bogor, Jurnal Citizenship Virtues, Vol. 2 No. 1, hlm. 293.

dan makna pendidikan masa depan, banyaknya lonjakan anak putus sekolah, tidak efektifnya pembinaan dalam sosialisasi wajib belajar, serta bantuan pemerintah kartu miskin distribusinya buruk dan tidak tepat sasaran.

Selain itu, pembangunan dan pemerataan pendidikan masih sulit terselenggara dengan maksimal sebab rendahnya perhatian pemerintah terhadap layanan pendidikan di wilayah-wilayah 3T, wilayah perbatasan dan wilayah pedalaman. Pemerintah juga jarang sekali melakukan sosialisasi arti penting pendidikan kepada masyarakat wilayah 3T yang memiliki tingkat partisipasi dalam pendidikannya rendah.

Ketimpangan dan ketidakmerataan pembangunan yang ada di Indonesia merupakan tanggung jawab dari negara terutama pemerintah. Hal ini juga tertuang pada pasal 31 UUD NRI 1945 dan UU No 39 tahun 1999. Dimana negara harus menjamin, memberikan dan melindungi hak, kewajiban dan kesempatan bagi warga negara Indonesia untuk mampu merasakan pendidikan. Selama ini pemerintah masih kurang fokus dalam menangani ketidakmerataan pendidikan.

Pemerintah cenderung memfokuskan pendidikan dan pembangunan pada wilayah-wilayah perkotaan khususnya di pulau Jawa. Untuk menyelesaikan masalah ketidakmerataan pendidikan di Indonesia, kita perlu melakukan beberapa langkah. Pertama, meningkatkan kemampuan dan jumlah guru. Kedua, membangun sekolah baru di daerah-daerah terpencil

3. Pelayanan Pendidikan yang masih Rendah dan Buruk

Pada pelayanan publik dalam sektor pendidikan juga masih terdapatnya beberapa kendala dan persoalan yang berdampak kepada kualitas pendidikan yang belum mampu terselenggarakan dengan maksimal dan efektif. Salah satu contohnya yaitu begitu sulitnya layanan pendidikan ini dapat merata menjangkau seluruh daerah di Indonesia karena terbatasnya juga dana anggaran pendidikan.

Pengelolaan dan alokasi dana pendidikan maupun dana subsidi dari pemerintah juga seringkali pertanyaan, kemana aliran dana tersebut. Hal ini juga disebabkan kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana pendidikan.

Pendidikan, dari jenjang dasar hingga tinggi, telah berubah statusnya menjadi barang mewah. Transisi pendidikan dari status barang publik yang menjadi tanggung jawab negara, beralih menjadi barang pribadi, menjadikan pendidikan sebagai industri bisnis. Sebagai akibatnya, pendidikan kini dianggap sebagai wadah produksi sumber daya manusia untuk memenuhi kebutuhan pasar, namun hal ini ternyata tidak terwujud karena pasar tidak mampu

menyerap tenaga kerja yang dihasilkan, menyebabkan tingkat pengangguran terus meningkat dari waktu ke waktu.⁶

Di Indonesia Timur, masih terdapat banyak daerah 3T yang belum mendapatkan akses pelayanan pendidikan yang memadai. Kendala-kendala yang dihadapi dalam penyediaan pelayanan pendidikan di seluruh Indonesia seringkali disebabkan oleh beberapa faktor, sehingga sulit untuk mengimplementasikan pelayanan pendidikan yang merata di daerah-daerah terpencil tersebut.

Penting untuk mengelola pelayanan pendidikan dengan sebaik-baiknya di daerah 3T. Ini termasuk daerah-daerah terluar atau tertinggal, daerah dengan masyarakat adat yang terpencil, daerah perbatasan dengan negara lain, serta daerah yang rentan terhadap bencana alam atau masalah sosial.

Dengan diperbaikinya management pendidikan pada anak-anak di daerah 3T, diharapkan masyarakat setempatnya dapat mengakses layanan pendidikan yang berkualitas dan selaras dengan apa yang mereka butuhkan, sehingga pendidikan yang mereka jalani mampu mengembangkan potensi dan berguna bagi kehidupan mereka kedepannya.

4. Sulitnya Akses Menuju Pendidikan

Penyelenggaraan pendidikan di Indonesia tidak hanya mengalami hambatan pada ketidakmerataan fasilitasnya, tetapi salah satu tantangan terbesarnya ialah sulitnya akses pendidikannya itu sendiri. Adanya kesenjangan akses pendidikan pada daerah maju dan daerah 3T. kita perlu memperhatikan akses pendidikan di Indonesia. Setiap tahun, lebih dari 1,5 juta anak tidak dapat melanjutkan sekolah.

Tidak hanya itu, lembaga pendidikan dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi juga sulit dijangkau oleh sebagian masyarakat yang tinggal di pedalaman. Banyak universitas terbaik terpusat di pulau Jawa, sehingga orang-orang dari pulau lain harus meninggalkan kampung halaman mereka untuk bisa melanjutkan pendidikan tinggi.

Dalam banyak kasus, anak-anak dan remaja di daerah pedesaan dan terpencil sering kesulitan mengakses layanan pendidikan setelah menyelesaikan sekolah dasar. Sebab tak ada SMA yang terjangkau atau terdekat, hal yang sama juga bisa terjadi pada anak-anak yang telah lulus dari bangku SMP.

⁶ Priadi Surya, 2012, Pemetaan Pendidikan (Education Mapping) sebagai Dasar Meningkatkan Layanan Pendidikan, hlm 2

Kondisi inilah yang secara tidak langsung menurunkan angka partisipasi sekolah (APS) karena perjuangan untuk menempuh pendidikan yang sangat sulit membuat seseorang malas untuk melanjutkan pendidikan selanjutnya.

Selain itu, anak-anak yang berada di daerah terpencil sulit mengakses sekolah, jarak tempuh sekolah sangat jauh dengan kondisi jalan yang tidak memungkinkan dan membutuhkan proses waktu yang cukup panjang sebab harus melintasi jalanan terjal, sungai maupun pegunungan. Hal ini dapat membutuhkan waktu dua jam jika kondisi jalan bagus. Masyarakat di daerah 3T juga belum terjamah untuk dapat memiliki akses informasi dan konektivitas yang lebih baik.

5. Terbatasnya Distribusi Tenaga Pendidik atau Guru yang Berkualitas

Guru dianalogikan sebagai akar peradaban suatu negara. Apabila suatu akar bersifat kuat maka akan kuat seluruhnya, Namun ketika akar itu tidak kuat maka peradaban suatu negara tidak akan bertahan lama. Hal ini juga dicerminkan dalam bidang pendidikan. Pendidikan yang berkualitas besar ditentukan dengan bagaimana kualitas tenaga pendidik dan gurunya.

Guru seharusnya tidak hanya berorientasi secara materi dan tidak hanya bermodalkan kepintaran, tetapi menjadi guru semestinya didukung dengan kepribadian yang tulus dari hati, ikhlas dan rela untuk melakukan pengabdian kepada masyarakat tanpa memilih-milih dimana ia akan bertugas. Namun pada kenyataannya kualitas guru seperti itu sulit direalisasikan pada fakta di lapangan.

Menurut Campbell dan Yates (2011) mengatakan bahwa guru lebih cenderung memilih tempat mereka sendiri untuk mengajar, dan sebagian besar guru hanya mau mengajar pada wilayah maju atau wilayah perkotaan.

Hal ini disebabkan untuk melakukan pengajaran dan pengabdian di daerah 3T tidak seanak atau sejahtera sebagaimana guru di perkotaan, Keterbatasan fasilitas di pulau tersebut menyebabkan proses belajar mengajar tidak sesuai harapan. Hal ini membuat banyak guru enggan tinggal di sana dan harus berusaha menyesuaikan diri dengan segala keterbatasan yang ada.

Pada akhirnya, tenaga pendidik atau guru-guru yang ada pada wilayah 3T merupakan guru yang kurang berkompeten, sebagian guru juga mengajar yang tidak sesuai dengan bidang keahliannya, sehingga proses pembelajaran tidak terselenggara dengan optimal.

Biasanya, masalah penempatan guru muncul karena ada kekurangan guru di daerah tertentu. Akibatnya, guru-guru yang sudah ada harus mengajar mata pelajaran lain agar

kebutuhan siswa tetap terpenuhi. Kekurangan guru ini seringkali terjadi di daerah-daerah terpencil, karena distribusi guru belum merata di wilayah tersebut. Namun, hal ini menyebabkan transfer ilmu pengetahuan tidak berjalan sebaik yang diharapkan

Selain kualitas guru yang penting, distribusi guru di daerah 3T juga menjadi isu penting. Jumlah guru di daerah 3T sangat terbatas, sementara di daerah lainnya jumlah guru sudah lebih mencukupi. Jadi, masalah yang sangat penting untuk dipecahkan adalah distribusi guru.

SOLUSI

Berdasarkan hasil pemaparan analisis diatas, kita dapat cermati bahwa problematika di Indonesia merupakan suatu hal serius yang harus dibenahi dengan serius. Oleh karena itu, guna memperbaiki kualitas dan pendidikan di Indonesia khususnya pada daerah 3T, pemerintah perlu memberikan fokus dan perhatiannya kepada daerah-daerah tertinggal.

Perlu juga adanya kerjasama dan partisipasi dari semua pihak baik dari pemerintah, lembaga pendidikan, masyarakat, yayasan maupun pemerintah daerah dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan agar tujuan nasional pendidikan dapat tercapai. Selain itu, diperlukan sinkronisasi yang baik antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, kementerian dan lembaga terkait dalam menetapkan suatu kebijakan pemerintah yang sekiranya dapat mensejahterakan seluruh siswa-siswi Indonesia.

Upaya yang dapat dibenahi oleh pemerintah untuk mengatasi problematika ketidakmerataan pendidikan yaitu diantaranya dengan, mendirikan bangunan-bangunan sekolah di beberapa desa 3T, mendirikan sekolah satu atap, melengkapi sarana prasarana, fasilitas dan tenaga pendidik serta mengadakan program pelatihan tenaga pendidik.

Pertama-tama, pemerintah harus mengalokasikan dana yang memadai untuk membangun dan meningkatkan infrastruktur pendidikan di wilayah-wilayah tersebut. Ini termasuk membangun sekolah-sekolah baru, memperbaiki fasilitas yang sudah ada, dan menyediakan sarana dan prasarana pendukung seperti perpustakaan, laboratorium, dan akses internet yang memadai.

Selain itu, program beasiswa atau insentif untuk guru yang bersedia mengajar di wilayah 3T dapat menjadi langkah positif. Beasiswa ini dapat membantu memotivasi para tenaga pendidik untuk memilih wilayah 3T sebagai tempat tugas mereka.

Dalam hal aksesibilitas, pemerintah perlu meningkatkan infrastruktur transportasi dan komunikasi ke wilayah 3T. Jalan raya yang baik dan aksesibilitas yang memadai akan mempermudah mobilitas guru dan siswa, serta memungkinkan distribusi materi pendidikan dan fasilitas lainnya.

Selanjutnya, program digitalisasi pendidikan perlu diperluas untuk mencakup wilayah 3T. Ini termasuk memastikan akses internet yang stabil dan memfasilitasi penggunaan teknologi pendidikan di sekolah-sekolah di wilayah tersebut.

Bagi Wilayah 3T yang belum tersedia layanan pendidikan, menyelenggarakan layanan Pendidikan sekolah kecil, diantaranya :⁷

- Sekolah terbuka : Menyelenggarakan layanan pendidik kunjung dari sekolah induk
- Sekolah terintegrasi : Menyelenggarakan Pendidikan yang dilaksanakan antar jenjang Pendidikan dalam satu lokasi

Disamping itu, sebetulnya pemerintah bersama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah membuat terobosan dan kebijakan untuk mengatasi pendidikan di daerah 3T Indonesia. Salah satu contohnya yaitu dengan dibentuknya program “Indonesia Mengajar dan Pelajar Muda” Program tersebut bertujuan untuk pemerataan pendidikan di seluruh wilayah Indonesia, terutama daerah 3T yang memiliki keterbatasan tenaga pendidik atau guru.

Program Pendidikan Mengajar dan SM-3T merupakan inisiatif penting untuk memberdayakan generasi muda terbaik Indonesia di wilayah 3T. Mereka direkrut, dilatih, dan dikirim untuk memberikan kontribusi dalam mempercepat pembangunan di wilayah-wilayah tersebut. Inisiatif ini terbukti efektif mengatasi kekurangan tenaga pendidik di daerah 3T, dengan sekitar 3000 sarjana pendidikan dikirimkan setiap tahun ke daerah-daerah terpencil. Sebelumnya, mereka mendapatkan pelatihan khusus tentang cara mengajar di daerah 3T.

Tingkat mutu pendidikan di Indonesia dapat ditingkatkan dengan kolaborasi semua pihak dalam masyarakat. Semua pelaku pendidikan, termasuk guru, kepala sekolah, orang tua, pemerintah, dan masyarakat, memiliki peran penting dalam memajukan pendidikan di daerah masing-masing. Dengan kerjasama yang kuat, kita dapat mencapai peningkatan mutu pendidikan yang signifikan di seluruh Indonesia.

SIMPULAN

Pendidikan di Indonesia belum mampu setara dengan negara lainnya, dikarenakan masih banyaknya problematika pendidikan yang masih perlu dibenahi terutama pada wilayah 3T (Terluar, Tertinggal dan Terpencil).

Beberapa problematika pendidikan yang ada pada wilayah 3T meliputi tingkat kesejahteraan dan karir guru yang bertugas di daerah terpencil sangat rendah, kurangnya

⁷ Agus Mardianto, M.Ak, 2021, “Pendidikan Bagi Anak di Daerah 3T”, Jakarta, Direktorat Sekolah Dasar

pemerataan fasilitas dan pembangunan, pendidikan, pelayanan pendidikan yang masih rendah dan buruknya pelayanan pendidikan, sulitnya akses menuju pendidikan dan terbatasnya distribusi tenaga pendidik atau guru yang berkualitas.

Oleh karena itu, semua elemen warga negara Indonesia perlu bahu membahu untuk menyelesaikan berbagai problematika pendidikan. Sebab kualitas pendidikan dan kehidupan masyarakat menjadi tanggung jawab semua pihak, terutama pemerintah dan negara

DAFTAR PUSTAKA

- (n.d.). Indonesia Mengajar. Retrieved November 6, 2023, from <https://indonesiamengajar.org/>
- Afrinel Okwita, 2016, "Wacana Dan Ketidakmerataan Pembangunan Di Indonesia", Jurnal Cahaya Pendidikan, Vol.2 No. 2, hlm. 229-241
- Agus Mardianto, M.Ak, 2021, "Pendidikan Bagi Anak di Daerah 3T", Jakarta, Direktorat Sekolah Dasar
- Firman Mansir, 2020, "Kesejahteraan Dan Kualitas Guru Sebagai Ujung Tombak Pendidikan Nasional Era Digital", Jurnal Ika : Ikatan Alumni Pgsd Unars, Vol. 8 No. 2, hlm 295
- Fitria Nur Auliah Kurniawati, 2022, "Meninjau Permasalahan Rendahnya Kualitas Pendidikan di Indonesia Dan Solusi", AoEJ: Academy of Education Journal, Vol.13 No. 1
- Hanya 6% Warga Indonesia yang Berpendidikan Tinggi pada Juni 2022.* (2022). Databoks. Retrieved November 6, 2023, from <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/09/20/hanya-6-warga-indonesia-yang-berpendidikan-tinggi-pada-juni-2022>
- Herry S, Soesanto, AT Soegito, Kardoyo, 2021, "Pengaruh Supervisi Akademik Terhadap Peningkatan Kompetensi Guru di Daerah 3T (Terdepan, Terpencil, Tertinggal)", Scholaria: Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan, Vol. 11 No. 2, hlm 166-172
- Laman resmi Indonesia Mengajar, <https://indonesiamengajar.org/>
- Mohamad A, Andika A, Melly W N, Nurlaila S, Rohman F, "Potret Pendidikan di Daerah Terpencil Kampung Manceri Cigudeg Kabupaten Bogor", Jurnal Citizenship Virtues, Vol. 2 No. 1, hlm. 293
- Priadi Surya, 2012, Pemetaan Pendidikan (Education Mapping) sebagai Dasar Meningkatkan Layanan Pendidikan, hlm 2
- Raudhah, 2020, "Hubungan Tingkat Kesejahteraan Guru Dengan Semangat Kerja Guru", Jurnal Guru Dikmen Dan Diksus, Volume 3 Number 2, hlm 186
- Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003
- Viva Budi K, 2022, "Hanya 6% Warga Indonesia yang Berpendidikan Tinggi pada Juni 2022", databoks.katadata.co.id
- Zulkarnaen, Ari Dwi Handoyo, 2019, "Faktor-Faktor Penyebab Pendidikan Tidak Merata Di Indonesia", Prosiding Seminar Nasional "Menjadi Mahasiswa Yang Unggul Di Era Industri 4.0 Dan Society 5.0"